

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Asia Pasifik merupakan wilayah yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap dunia. Asia Pasifik terdapat 21 negara tergabung dalam kawasan yang besar manfaat kerjasama, namun hal ini juga dapat berpotensi munculnya konflik. Khususnya di sektor keamanan regional, kawasan Laut Cina Selatan menjadi pusat perhatian dunia semenjak negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia melakukan penyebaran pengaruhnya di kawasan tersebut guna kepentingan tertentu. Sebagai negara yang berada dalam kawasan Asia Pasifik, Jepang dan Australia membentuk kerjasama guna menjaga keamanan di wilayah tersebut. Ini merupakan pertama kalinya Jepang menjalin hubungan kerjasama pertahanan dengan negara lain selain Amerika Serikat.



Sumber : influencerelations.com

Gambar 1.1 Peta Asia Pasifik

Kawasan Asia Pasifik adalah salah satu dari beberapa kawasan di dunia yang tidak dapat menghindari dari efek globalisasi. Selain masih menyisakan sisa-sisa Perang Dingin, khususnya sumber ancaman yang berasal dari bidang militer, kawasan Asia Pasifik ini juga menyaksikan munculnya isu-isu baru yang sangat potensial memberi dampak terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Isu-isu tersebut termasuk dalam kategori non-tradisional. Masalah keamanan non-tradisional akhirnya menjadi isu yang sering kali menjadi agenda penting pertemuan-pertemuan internasional. Masalah keamanan non-tradisional bukanlah masalah baru untuk kawasan Asia Pasifik. Ada beberapa alasan historis yang menjadi dasar munculnya isu-isu tersebut. *Pertama*, tatanan politik yang menyaksikan eksploitasi negara-negara berkembang oleh negara-negara maju. Ini menjadi alasan dasar bagi munculnya resistensi konflik dan dari kelompok-kelompok negara-negara yang menjadi target eksploitasi. Terorisme diasumsikan muncul karena faktor ini. Tidak adanya harmoni dalam tatanan internasional dan semakin menjadi buruk oleh kecenderungan hegemoni negara-negara besar. Akibatnya komunitas negara-negara berkembang yang lemah harus bersaing untuk memperjuangkan aspirasi mereka bahkan dengan aksi-aksi kekerasan.

Kedua, adalah ekonomi dunia yang tidak seimbang sehingga memunculkan isu ketidakamanan (*insecurity*). Meskipun negara-negara memperoleh kesempatan untuk membangun kerjasama internasional guna memajukan pembangunan ekonomi mereka, gelombang globalisasi justru memperbesar kesenjangan antara negara kaya dengan negara miskin. Akses negara-negara berkembang ke sumber-sumber ekonomi menjadi semakin terbatas dan ini bukan hanya karena tidak mampu bersaing tetapi juga karena keterbelakangan mereka dalam mengejar dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Semuanya memberi kontribusi kepada munculnya masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Kondisi demikian dapat menjadi sumber lahirnya kegiatan-kegiatan terorisme atau bentuk-bentuk kejahatan transnasional lain, misalnya penyelundupan manusia dan perdagangan narkoba.

Ketiga, situasi yang tidak seimbang antara pembangunan manusia dan lingkungan alam telah memunculkan isu-isu keamanan lingkungan. Pola pembangunan yang

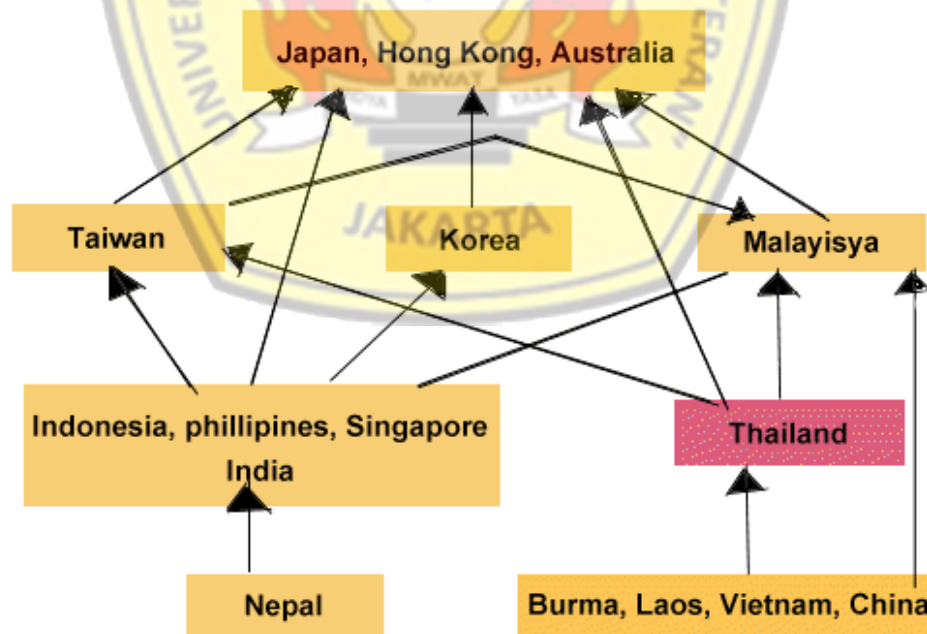
tradisional menyebabkan munculnya ketidakharmonisan antara manusia dan lingkungan, ini menghadapkan manusia kepada isu keamanan lingkungan, misalnya bencana alam atau kelangkaan sumber-sumber air.

Keempat, kegagalan dalam pembentukan mekanisme kontra krisis internasional telah mempersulit identifikasi dan penanganan ancaman keamanan non-tradisional. Seperti yang disebutkan, globalisasi ekonomi yang semakin nyata telah menimbulkan saling ketergantungan yang semakin kuat antar negara. Akan tetapi, kondisi ini dapat membuat pembangunan ekonomi mengalami pasang surut terutama jika ekonomi dari negara bersangkutan tidak mampu menjaga dan mengelola saling ketergantungan tersebut. Hal ini dapat memberi kontribusi kepada munculnya krisis finansial, dengan kata lain hilangnya mekanisme internasional untuk mengatasi krisis finansial menyebabkan munculnya isu keamanan finansial. (Djalantik, 2015:20)

Tantangan keamanan non-tradisional di Asia Pasifik antara lain krisis finansial, kejahatan transnasional, terorisme internasional, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, perbatasan wilayah dan lain sebagainya. Isu keamanan non-tradisional memiliki implikasi langsung terhadap keamanan Asia Pasifik secara keseluruhan dan kemakmuran dari masing-masing negara di kawasan. Gravitasi dari permasalahan itu dapat dilihat dari bagaimana isu-isu tersebut dibicarakan, yaitu baik di forum akademik maupun para pembuat kebijakan. Isu-isu demikian digambarkan dan diperlakukan oleh para pembuat keputusan sebagai isu yang mengancam kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara dan kemakmuran rakyatnya. Jika diamati lebih dalam, isu-isu tersebut memiliki karakter domestik dan internasional yang pada umumnya dirumuskan lebih dalam konteks sosial dan ekonomi daripada konteks militer. Isu keamanan non-tradisional bukan hanya mengancam keamanan negara tetapi juga masyarakat, individu, ekonomi nasional, dan ekosistem. Lebih dari itu, merebaknya dampak dari ancaman oleh percepatan dari efek globalisasi. Ini mengartikan bahwa ada korelasi antara tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh isu non-tradisional dan percepatan dari proses globalisasi. Beberapa isu keamanan non-tradisional yang cukup menyita perhatian kawasan Asia Pasifik antara lain: (1) penyakit menular; (2) kejahatan transnasional, misalnya *drugtrafficking*, pencucian

uang, *cybercrime*, perompak, penyelundupan senjata, perdagangan manusia; dan (3) kemiskinan.

Masalah kejahatan transnasional paling menyita perhatian negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Beberapa organisasi kejahatan transnasional yang sangat berbahaya beroperasi di kawasan Asia Pasifik. Kejahatan semacam ini jelas merupakan ancaman terhadap perbatasan nasional, mengerosi aturan-aturan hukum, ekonomi nasional dan masyarakat. Masalah kejahatan transnasional memerlukan tanggapan secara transnasional juga tetapi kerjasama antara negara seringkali dipersulit oleh kenyataan bahwa penanganan masalah itu menyentuh isu sensitif seperti yurisdiksi domestic, hukum ekstradisi, dan korupsi. Lalu lintas perdagangan narkoba mungkin merupakan isu kejahatan transnasional yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Lalu lintas perdagangan narkoba ini juga menyebabkan meningkatnya kejahatan dengan kekerasan dan potensi sumber daya manusia yang terbuang.



Sumber : humantraffickingasiapacific.weebly.com

Gambar 1.2 Human Trafficking di Asia Pasifik

Pada gambar diatas adalah contoh kejahatan perdagangan manusia di kawasan Asia Pasifik. Perdagangan manusia ini diselundupkan melalui jalur laut maupun udara untuk dijadikan tenaga kerja illegal maupun pekerja seks.

Saat ini, ancaman keamanan non-tradisional yang dihadapi oleh kawasan Asia Pasifik, termasuk dalam dua kategori. Kategori *pertama* adalah masalah keamanan non-tradisional yang secara langsung mempengaruhi pembangunan ekonomi Asia Pasifik, yaitu:

1. Masalah keamanan ekonomi dengan krisis ekonomi.
2. Masalah keamanan sumber daya alam dengan keamanan energi. Sebagian besar negara di kawasan Asia Pasifik akan mengalami kekurangan energi, khususnya Jepang, China, dan India yang sangat bergantung pada impor energi. Pemasok energi mereka terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang sangat tidak stabil misalnya di Timur Tengah dan Asia Tengah sehingga seluruh negara di kawasan Asia Pasifik akan menghadapi ancaman pada suplai energi mereka khususnya jika keamanan rute energi dan pipa transnasional tidak dijamin keamanannya.
3. Masalah keamanan lingkungan dengan keamanan sumber air. Meningkatnya populasi dan ekonomi Asia Pasifik tidak hanya menimbulkan tuntutan yang lebih besar atas sumber-sumber air tetapi juga menimbulkan polusi besar dan merusak lingkungan termasuk sumber-sumber air.

Kategori *kedua* adalah isu keamanan yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan internal dan eksternal dimana ekonomi dan masyarakat tumbuh pesat yaitu:

1. Terorisme muncul sebagai akibat dari ketimpangan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Terorisme menjadi gejala yang sulit untuk di deteksi kemunculannya ketika sebuah ekonomi menunjukkan keberhasilannya tetapi justru menimbulkan ketidakadilan bagi sekelompok masyarakat. Aksi terror akhirnya menjadi pilihan untuk mengedepankan aspirasi mereka. Dalam konteks ini, ditemukan wilayah yang luas mulai dari Timur Tengah sampai ke

Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia Timur. Wilayah ini adalah wilayah yang sangat kuat kegiatan terorismenya sehingga dianggap sebagai front terdepan bagi upaya pemberantasan terorisme. Pada saat yang sama, di beberapa negara ditemukan unsur-unsur atau kekuatan yang berbasis ekstrimis agama dan mereka yang ingin memisahkan diri. Unsur terorisme yang berbasis agama dan kelompok yang ingin memisahkan diri ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Mereka tidak hanya secara langsung membahayakan integritas territorial, stabilitas, dan pembangunan nasional tetapi juga mempengaruhi stabilitas pembangunan kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan.

2. Kejahatan transnasional drug trafficking. Tiga dari empat wilayah produksi narkoba ada di kawasan Asia Pasifik yaitu segitiga emas; sabuk bulan sabit (crescent) di Afghanistan, Iran, dan Pakistan; dan Lembah Beka di Libanon. Banyak dari kejahatan narkoba ini sekarang membentuk kelompok atau jaringan dan bahkan dipersenjatai.
3. Penyebaran penyakit AIDS. Meskipun tingkat penularan di kawasan Asia Pasifik tidak separah di Afrika, tetapi ada kecenderungan dari penyakit itu untuk lebih meluas. Penderita yang terjangkit penyakit ini berada di wilayah-wilayah padat penduduk misalnya China, India, dan Indonesia.

Ada yang berpendapat bahwa ancaman keamanan non-tradisional sebenarnya tidak beroperasi secara sendirian namun juga berhubungan dan berinteraksi dengan ancaman keamanan tradisional. Kedua macam isu ini bahkan bisa saling berubah dalam situasi tertentu, dalam arti ancaman keamanan non-tradisional dapat berubah menjadi ancaman keamanan tradisional atau sebaliknya sehingga menghilangkan batasan-batasan yang memisahkan antara kedua ancaman tersebut.

Pertama, ancaman keamanan non-tradisional secara langsung dapat memunculkan isu keamanan tradisional, misalnya masalah pengungsi, kerusakan dan polusi lingkungan, merupakan dampak langsung dari perang. Kedua, beberapa isu keamanan tradisional dapat berkembang menjadi isu keamanan non-tradisional, misalnya lahirnya terorisme sangat berhubungan erat dengan sebuah mentalitas yang menolak hegemoni, dengan konflik dan gangguan-gangguan yang dipicu oleh isu

kedaulatan dan territorial. Ketiga, beberapa isu keamanan non-tradisional dapat memunculkan konflik keamanan tradisional, misalnya upaya teroris untuk mendapatkan peralatan teknologi canggih seperti nuklir, senjata biologis dan kimia, yang akan mendorong proliferasi senjata pemusnah massal. Sifat interaktif dari kedua macam isu keamanan tersebut juga ditemukan di wilayah Asia Pasifik. Ancaman keamanan transnasional harus ditanggapi secara transnasional dan melibatkan negara-negara yang bukan hanya menjadi korban dari ancaman tersebut tetapi negara-negara lain yang menghiraukan efek negative dari ancaman keamanan non-tradisional tersebut. Kawasan Asia Pasifik merespon hal tersebut dengan membangun respon dan kerjasama regional. (apec.org, counter terrorism, diakses pada 10 Januari 2016)

Melalui kerjasama regional, ancaman keamanan non-tradisional dapat diatasi secara efektif. Dengan membangun kerjasama, negara-negara akan memahami lebih jauh bukan hanya konteks munculnya isu keamanan non-tradisional tetapi juga preferensi spesifik dari negara-negara dalam memerangi ancaman keamanan non-tradisional tersebut. Koordinasi antar negara di kawasan Asia Pasifik menjadi penting ketika isu keamanan non-tradisional tersebut telah menyentuh aspek kedaulatan dan integritas territorial dari negara-negara yang menjadi bagian dari kerjasama tersebut. Dalam kerjasama tersebut, negara-negara Asia Pasifik perlu sepakat bahwa keamanan non-tradisional pada hakekatnya adalah transnasional. Selain itu, keamanan nasional, keamanan regional dan keamanan global saling terkait. Dalam mengatasi isu keamanan non-tradisional, Asia Pasifik harus mengutamakan kepentingan dan kewajiban bersama, semua negara di Asia Pasifik perlu berpikir di luar konsep keamanan tradisional.

Pergeseran keseimbangan kekuatan global telah meningkat sangat penting dalam masyarakat internasional Asia Pasifik. Sementara pergeseran ini menyediakan peluang kerjasama keamanan, menimbulkan isu-isu regional dan ketegangan. Secara khusus wilayah Laut Asia Timur adalah tempat bagi sejumlah aktor seperti negara-negara dengan kekuatan militer yang besar, atau memiliki senjata nuklir atau dengan pengembangan nuklir. Namun kerangka kerjasama regional di bidang keamanan belum cukup dilembagakan. Negara di wilayah ini memiliki sistem politik, ekonomi

dan sosial yang kontras, dan dengan demikian pandangan keamanan bagi Asia Pasifik sangat beragam. Hal ini merupakan karakteristik dari lingkungan strategis kawasan ini. Di sisi lain, kawasan Asia Pasifik juga menyaksikan kenaikan peluang untuk pertukaran bilateral dan kerjasama di antara negara-negara di kawasan tersebut. Selain itu dialog keamanan multilateral termasuk ASEAN Regional Forum (ARF), dan latihan bersama bilateral dan multilateral. Inisiatif ini berkontribusi pada pengembangan saling pengertian dan peningkatan kemampuan respon. Oleh karena itu, penting untuk lebih mempromosikan dan mengembangkan inisiatif ini untuk stabilitas keamanan regional.

Amerika memberikan nilai sangat penting untuk melindungi wilayahnya dari dua sisi, Samudera Atlantik dan samudera Pasifik yang mengelilinginya. Persaingan global Amerika Serikat (AS) versus Cina di kawasan Asia Pasifik makin mengental membentuk polarisasi. Jepang, pertama kalinya sejak Perang Dunia II, mengizinkan militernya untuk beroperasi di luar negeri. China mengancam langkah itu karena mengkhawatirkan eskalasi konflik di Laut Cina Selatan. Beijing mengancam Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyusul diberlakukannya Undang-Undang (UU) keamanan yang baru, Selasa (29/3/2016). UU itu memungkinkan militer “Negeri Sakura” itu untuk beroperasi di luar negeri.

Beijing melalui kantor berita resmi China, Xinhua, sontak menuding pemerintahan Abe mengabaikan konstitusi. Kebijakan itu pada akhirnya “hanya akan mengancam hak warga Jepang untuk hidup dalam damai,” tulis media China. Xinhua juga menilai UU keamanan yang baru bakal menjadi “tantangan besar untuk perdamaian di kawasan Asia Pasifik yang saat ini pun sudah sangat rentan. Tokyo berdalih, amandemen UU keamanan diperlukan sebagai reaksi atas perubahan iklim keamanan di Asia Timur, termasuk ancaman nuklir Korea Utara dan ambisi militer China di Laut China Timur dan Selatan. Abe meyakini perubahan peran militer Jepang akan menguntungkan kemitraan strategis dengan Amerika Serikat. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, peran militer Jepang tunduk pada prinsip pasifisme dan dibatasi pada pertahanan negara. Peraturan kontroversial yang disahkan parlemen

September tahun lalu itu menganulir konstitusi pasifis Jepang dan membuka jalan bagi keterlibatan militer dalam di konflik di Laut China Selatan.

Merespon keluarnya Jepang dari politik luar negeri 'pasif' menuju aktif di kawasan Pasifik direspon oleh China tahun ini akan menggelar parade militer besar-besaran pertama sejak 2009 untuk menandai berakhirnya Perang Dunia II. Namun, tujuan utama parade militer itu adalah untuk "*menakuti-nakuti Jepang*".

Secara resmi Amerika Serikat menerapkan kebijakan *rebalance* yang kemudian difokuskan di kawasan Asia Pasifik. Sehingga, fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak lagi ke kawasan Timur Tengah melainkan Asia. Ketika kepemimpinan Presiden Bush berganti ke Barrack Obama pada tahun 2009, Amerika Serikat mulai merubah fokus kebijakannya. Hal tersebut diawali dengan penarikan pasukan Amerika Serikat dari Irak. Penarikan pasukan Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah memperkuat indikasi perubahan strategi dalam kebijakan militer Amerika Serikat ke kawasan Asia Pasifik. Amerika menyatakan "*Pivot to Asia*" yang merupakan sebuah ungkapan atas strategi yang difokuskan ke kawasan Asia Pasifik. Strategi tersebut berupa konsentrasi arah kebijakan luar negeri yang merupakan kelanjutan dari kepentingan nasional Amerika Serikat (Joao Arthur Reis, "*China's Dual Responseto the US Pivot*" 2014)

Upaya yang diterapkan oleh Amerika Serikat adalah sebagai bentuk prioritas politik luar negerinya ke kawasan Asia Pasifik. Strategi ini memfokuskan pada beberapa bagian, diantaranya adalah pengembangan kerjasama ekonomi, penguatan terhadap negara aliansi, jaminan keamanan bersama melalui institusi regional untuk membantu menangani sengketa terkait batas wilayah secara damai. Penelitian yang dilakukan oleh CSR (*Congressional Research Service*), tujuan utama dari "*PivottoAsia*" adalah untuk memberikan pengaruh lebih besar terhadap perkembangan di kawasan Asia Asia Pasifik, diantaranya dalam hal ekonomi, sosial, keamanan termasuk militer (*Congressional Research Service, "Pivot to the Pacific? The Obama Administrationl's "Rebalancing" Toward Asia"*, 2012). Perkembangan wilayah Asia Pasifik yang menjadi pusat daya tarik dalam politik dan ekonomi sedang bergeser secara perlahan, sehingga Rusia pun tidak bisa bersikap tidak peduli.

Perlu ditambahkan lagi bahwa hal ini tidak terbatas pada faktor geografis – tiga perempat teritori Rusia terletak di Asia. Rusia membantu pengolahan permasalahan politik, energi dan lingkungan serta masalah lainnya yang timbul di kawasan Asia Pasifik. Hal ini dapat dikatakan bahwa dari dulu maupun di masa yang akan datang, Rusia tetap mempunyai kepentingan dalam bidang politik, ekonomi, dan militer di kawasan Asia Pasifik. Asia Pasifik sudah menjadi kekuatan penggerak ekonomi modern disebabkan kemunduran ekonomi berkepanjangan di Barat. Kawasan Asia Pasifik praktis menjadi pemimpin di dalam perdagangan, investasi dan pembangunan ekonomi.

Jepang sangat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di kawasan melalui transfer teknologi dan modal ke negara-negara yang sedang berkembang di kawasan Asia Pasifik (Yanyan Mochamad Yani, *Jepang Tingkatkan Peran di Asia Pasifik*). Misalnya untuk menyesuaikan struktur ekonominya dalam kerangka pembagian kerja internasional yang lebih sehat dan efisien, bekerjasama dalam pengembangan produksi bahan pangan dan energi, membuka pasaran-pasaran untuk barang-barang hasil industri yang padat karya dari negara-negara yang sedang berkembang di kawasan Asia Pasifik, melakukan peranan perantara dalam Dialog Utara-selatan dengan mengambil sikap moderat diantara negara-negara industri dan mendorong serta membantu pembentukan Masyarakat Asia Timur (*East Asia Community*). Struktur multipolar yang semakin kompleks mengharuskan setiap negara untuk adaptif dengan keadaan geo-politik dan geo-strategi di Asia Pasifik. Misalnya dengan kemampuan militer yang semakin meningkat, Cina telah menjadi ancaman bagi AS di kawasan. Pemerintahan Jepang memberikan sikap waspada dan proaktif dengan perkembangan pada tataran regional tersebut. Jepang harus sangat berperan besar di Asia Pasifik dengan berbagai cara, Jepang dapat memberikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui perannya di berbagai bidang yakni ekonomi, politik, dan keamanan.

Cina terlihat jelas memiliki keinginan untuk mengembangkan militer dan menguatkan penegakan hukum maritim di wilayah Asia Pasifik, mekanisme strategi yang digunakan yaitu menyeruduk atau memblokir kapal dari negara-negara lain dan

berlebihan atas upaya kontra mereka merupakan taktik Cina untuk mencegah negara lain dari menanggapi lebih dari pendekatan tradisional dari kekuatan kekerasan (Aaron Austin, "China Subtle Strategy in The South China Sea" 2013). Ada harapan bagi Cina untuk berbagi dan mematuhi norma-norma internasional, dan memainkan peran yang lebih aktif dan kooperatif untuk masalah-masalah regional dan global. Di sisi lain, kemampuan militer Cina telah maju pesat di berbagai daerah melalui peningkatan yang terus menerus di anggaran militernya tanpa transparansi yang cukup. Selain itu Cina telah mengambil tindakan yang dapat dianggap sebagai upaya untuk mengubah *status quo* dengan paksaan berdasarkan dengan pernyataan mereka sendiri, yang sesuai dengan urutan hukum internasional yang ada, dalam maritime dan udara termasuk Laut China Timur dan Laut China Selatan. Cina telah memperluas dan mengintensifkan kegiatannya di laut dan udara di wilayah sekitar Jepang, termasuk wilayah perairan dan udara di sekitar pulau Senkaku. Cina telah menunjukkan langkah yang tampaknya melanggar kebebasan mengoperasikan penerbangan atas laut lepas dengan mendirikan Pertahanan Udara Zona Identifikasi di Laut China Timur.

Sikap seperti eksternal dan kegiatan militer oleh Cina, ditambah dengan kurangnya transparansi dalam bidang militer dan kebijakan keamanan, telah menjadi perhatian masyarakat internasional termasuk Jepang. Oleh karena itu Pemerintah Jepang perlu memperhatikan situasi ini. Hal ini disebabkan oleh keinginan Cina untuk menguasai wilayah Laut Cina Selatan yang berada di kawasan Asia Pasifik. Ketegangan negara-negara yang berkonflik memperebutkan Laut Cina Selatan menjadi ancaman nyata bagi kawasan Asia Pasifik karena dengan adanya peningkatan militer Cina, akan membuat konflik semakin panjang dan berpotensi perang.

Menanggapi hal tersebut, Jepang lalu membangun hubungan kerjasama dengan Australia. Hal ini dilakukan hanya untuk mempererat kerjasama trilateral antara Jepang-Australia-AS. Pada Maret tahun 2007 Jepang dan Australia menandatangani perjanjian *Joint Declaration on Security Cooperation*, hal ini ditunjukkan oleh penyelenggara KTT saat pertemuan menteri pertahanan dan pengesahan

Acquisition and Cross-Serving Agreement (ACSA) dan *Information Security Agreement* (ISA). Kerjasama ini sebenarnya bukan hanya hubungan bilateral saja namun trilateral antara Jepang-Amerika Serikat-Australia. Amerika Serikat melihat potensi Australia di kawasan Asia Pasifik dan mengajak kerjasama dalam menjaga perdamaian di kawasan tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, AS meminta Jepang untuk membangun kerjasama dengan Australia untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Sekalipun deklarasi keamanan Jepang-Australia lebih rendah tingkatnya daripada persetujuan jaminan keamanan Jepang-Amerika, tapi deklarasi ini tersebut dalam batas-batas besar mencerminkan kenaikan substansial taraf kerjasama kedua negara di bidang militer dan menjadi perhatian besar bagi dunia. Isi utama deklarasi itu antara lain ialah Jepang dan Australia merumuskan rencana aksi tentang peningkatan kerjasama jaminan keamanan, meningkatkan dialog menteri luar negeri dan menteri pertahanan antara kedua negara dan mengadakan pertemuan konsultasi jaminan keamanan “2+2” secara berkala (Indonesia.cri.cn, 2007).

Banyak yang beranggapan Jepang terburu-buru menandatangani deklarasi itu dengan Australia adalah untuk memperluas peran militernya di kawasan Asia Pasifik dengan alasan yang dapat dibenarkan, hal ini agar pasukan Jepang dapat kembali menjelajahi Samudera Pasifik. Dari sisi Australia, penandatanganan deklarasi bersama dengan Jepang lebih mengarah ke landasan pertimbangan ekonomi mengingat Jepang adalah mitra perdagangan terbesar Australia.

1.2 Perumusan Masalah

Pada tahun 2007 perjanjian kesepakatan kerjasama Jepang dan Australia telah ditandatangani. Dalam perjanjian tersebut mencakup poin-poin bentuk kerjasama kedua negara tersebut, salah satunya menjaga keamanan di wilayah Asia Pasifik. Ini membuktikan bahwa Jepang dapat mengirim pasukan pertahanannya untuk memberikan “bantuan internasional” dan tidak lagi hanya di batas wilayah Jepang saja. Sesuai penjelasan diatas, yang menjadi pertanyaan adalah:

Bagaimana Implementasi Kerjasama Pertahanan Jepang-Australia (JADSC) dalam menjaga kawasan Asia Pasifik 2012-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kerjasama pertahanan yang dilakukan Jepang dan Australia
2. Untuk menganalisa kerjasama Jepang dan Australia dalam menjaga keamanan di kawasan Asia Pasifik

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi para pembaca serta penulis sendiri mengenai penelitian ini yaitu:

1. Memberi pemahaman dalam studi Hubungan Internasional mengenai kerjasama Jepang-Australia dalam bidang pertahanan di Asia Pasifik.
2. Dapat memberikan informasi dan data dalam Hubungan Internasional yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan referensi dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan kerjasama pertahanan Jepang dengan beberapa negara guna menjaga keamanan wilayah.

Penelitian pertama membahas mengenai *Evaluasi Hubungan Jepang-Amerika Serikat dari segi Militer 2000-2010* (Achmad Firdaus H. (2014)), kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II membuat Jepang harus memperbaiki kehancuran yang dideritanya akibat perang melalui perbaikan bidang ekonomi, untuk memperbaiki perekonomiannya, Jepang menyerahkan pertahanannya kepada Amerika Serikat (AS) agar dapat lebih berkonsentrasi dalam membangun perekonomiannya kembali dari keterpurukan perekonomian dan kembali diperhitungkan di internasional.

Pada masa pasca-Perang Dingin keterkaitan ekonomi keamanan menjadi hal yang terpenting untuk tetap bertahan di era perubahan system internasional. Di tambah lagi dengan peran Jepang di dunia Internasional yang semakin membesar telah mendorong Jepang untuk lebih meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanannya melalui aliansi Jepang-AS. Dasar-dasar kebijakan keamanan Jepang adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pertahanan yang bersifat eksklusif, yaitu Jepang tidak akan menggunakan kekuatannya kecuali terdapat ancaman nyata terhadap keamanan dalam negeri Jepang dan menggunakan kekuatannya dijaga pada tingkat yang minimum bagi pertahanan diri. Hal ini disesuaikan dengan strategi pertahanan pasif yang terdapat dalam konstitusinya. Oleh karena itu Jepang tidak diperbolehkan mempunyai kekuatan militer yang mampu menyerang negara lain sebagai contoh *Self Defense Forces* (SDF) tidak diperbolehkan mempunyai *Inter-Continental Ballistic Missile* (ICBM)
2. Jepang tidak akan menjadi negara militer kuat, dalam arti bahwa kekuatan militer Jepang tidak akan mengancam keamanan negara lain
3. Jepang akan mematuhi tiga prinsip non-nuklir, yaitu: tidak mempunyai persenjataan nuklir, dan tidak memperbolehkan persenjataan nuklir di Jepang
4. Kekuatan militer Jepang tetap berada dibawah kekuasaan sipil sebagai ciri dari negara demokrasi. Operasi pertahanan SDF tetap memerlukan persetujuan dari legislatif.

Pembuatan kerangka dasar dari kebijakan pertahanan dilihat dari berbagai aspek, Jepang selalu melihat dari 3 faktor penting yaitu konstitusi Jepang, perjanjian keamanan dengan AS, serta piagam PBB. Ketiga faktor ini menjadi acuan penting dalam kebijakan pertahanan Jepang. Pemerintah Jepang mengeluarkan 3 buah kebijakan keamanan yang menjadi dasar bagi peran keamanan Jepang dalam aliansi Jepang-AS.

Penelitian berikutnya membahas mengenai ***Kebijakan Strategis Pertahanan Jepang Pasca Perang Dingin Sebagai Bentuk Adaptasi Jepang Terhadap***

Dinamika Keamanan Internasional 1990-2007 (Rosy Handayani (2008)) setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Jepang dihadapkan pada Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Penandatanganan perjanjian Jepang-AS di San Fransisko tanggal 8 September 1951 dan berlaku efektif pada 28 April 1952 menjadikan Jepang negara yang sangat bergantung pada AS dalam hal pertahanannya. Setelah Jepang berkonsentrasi membangun ekonominya kembali, dalam hal diplomasi terutama terhadap lingkungan Asia, Jepang bersikap *low-key*, diplomasi damai dan *nonassertive*. Sepanjang 1950-1960 kebijakan luar negeri Jepang didasarkan pada tiga prinsip dasar yaitu, kerjasama dengan AS dengan alasan keamanan dan ekonomi, promosi system kerjasama perdagangan bebas yang baik demi kepentingan pemenuhan kebutuhan Jepang, dan kerjasama internasional melalui PBB.

Pada 20 Mei 1957, cabinet menyetujui Kebijakan Dasar Pertahanan Nasional Jepang yang diadopsi oleh *National Defense Council*. Kemunculan kebijakan dasar tersebut menjadi awal bagi Jepang untuk kembali memberi perhatian pada masalah pertahanannya, walaupun secara eksplisit tidak menunjukkan indikasi untuk melakukan pengembangan sector pertahanan. Tujuan pertahanan nasional adalah untuk mencegah agresi untuk tujuan melindungi kemerdekaan dan perdamaian Jepang yang berdiri di atas demokrasi. Kebijakan dasar Jepang di bidang pertahanan menjadi tuntutan bagi Jepang dalam membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan masalah pertahanan negaranya. Penyerahan sepenuhnya masalah pertahanan kepada AS adalah tindakan yang dinilai tepat pada saat itu.

Hal yang perlu diperhatikan dari kebijakan pertahanan Jepang pada masa perang dingin ini adalah fokus yang masih berpusat pada keamanan dalam negeri semata. Jepang pada masa perang dingin masih mengedepankan strategi keamanan nasional semata-mata berupaya mencegah masuknya ancaman mencapai Jepang, dalam hal ini dengan memperkuat kemampuan pertahanan dalam negeri dan pembentukan aliansi keamanan dengan AS. Upaya Jepang untuk lebih memperhatikan situasi keamanan secara menyeluruh dan mengupayakan kerjasama dengan negara-negara lain untuk mencegah munculnya ancaman sejak awal sebagai bagian dari strategi keamanan

internasional belum begitu terlihat. Jepang melihat AS sebagai kekuatan yang akan mampu melindungi Jepang dari ancaman eksternal dan bergantung semata pada aliansi keamanan dengan AS untuk mengatasi segala ancaman.

Kritikan keras AS saat Jepang menolak membantu AS saat Perang Teluk dianggap Jepang karena terikat dengan Pasal 9 konstitusi 1947. Jepang hanya bersedia menanggung biaya operasional pasukan multinasional. Setelah tekanan yang diberikan AS demikian besar kepada Jepang, akhirnya Jepang mengirimkan kapal penyapu ranjau dan dilakukan saat ketegangan di Teluk telah mereda. Karena hal tersebut, kalangan elit AS menganggap Jepang tidak dapat diandalkan sebagai sekutu. Jepang menyadari perkembangan wacana yang diberikan AS dapat membahayakan hubungan aliansinya.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Konseptual

1.6.1 *Comprehensive Security* (Keamanan Komprehensif)

Keamanan komprehensif (*comprehensive esecurity*) menjelaskan mengenai apa yang menjadi ancaman bagi negara-negara sehingga dibutuhkan pola keamanan yang menyeluruh pada sebuah kawasan. Beberapa hal yang harus dipahami mengapa keamanan komprehensif ini sangat dibutuhkan di sebuah wilayah. Asia Pasifik adalah kawasan yang sangat luas dan besar dengan keadaan domestic dan keamanan eksternal yang perhatian utamanya berbeda-beda. Aktor yang berpengaruh dalam keamanan di kawasan seperti negara/pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional memiliki peran penting dalam perkembangan keamanan politik, ekonomi, sosial, budaya di kawasan.

Keamanan komprehensif lebih memperhatikan keamanan negara dan rezim daripada rakyat yang menjadi pusat perhatian keamanan manusia. Oleh karena itu, agar dapat bersinergi dengan keamanan manusia, keamanan komprehensif harus diperluas secara vertical ke *who should protected against such threats?* Dengan menempatkan individu dan komunitas sebagai pusatnya (Amitav Acharya. 2001. “*Human Security*” dalam *East versus West. Summer International Journal*. Hlm 453-460). Kerjasama ini harus menampung berbagai kepentingan pihak-pihak negara agar

terciptanya keseimbangan kekuatan di kawasan. Prinsip *self-reliance* berkaitan dengan kepercayaan antara satu negara dengan negara yang lain untuk mendukung keamanan komprehensif.

1.6.2 Cooperative Security (Kerjasama Keamanan)

Pada dasarnya kerjasama keamanan (*cooperative security*) terbentuk karena adanya keinginan negara-negara yang bekerja sama untuk menjaga dan memastikan kepentingan nasional mereka. Dalam menangani masalah ini, terdapat norma-norma yang digunakan bagi aktor-aktor yang bekerja sama untuk saling berinteraksi. Seperti pendapat John Gerard Ruggie, bahwa persetujuan kerjasama itu bergantung kepada beberapa prinsip yang digunakan untuk melandasi hubungan yang secara spesifik sangat bergantung pada faktor-faktor tertentu (John Gerard Ruggie, “*Multilateralism the Theory of an Institution*,”1993). Lebih jelasnya, bahwa negara-negara yang terlibat kerjasama satu sama lain harus memiliki tradisi kerjasama dan aturan baik verbal maupun non verbal yang akan mengatur cara mereka berinteraksi.

Sementara itu menurut Antonia dan Abram Chayes mengemukakan bahwa hal ini perlu dilandasi “dasar normative yang kuat” di dalam pengaturan tersebut. Hal ini ditekankan karena menurut mereka keberhasilan dari sistem kerjasama ini bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dengan norma yang telah diatur. Jadi kerjasama ini tidak hanya norma penting yang harus ditetapkan, namun juga harus fleksibel atau kerjasama ini akan menemui titik kegagalan (Antonia Chayes, “*Regime Architecture: Elements and Principles*,”1994). Dengan demikian dapat dilihat dalam kerjasama yang melibatkan *littoral states* penyelenggaraan dan jaminan keamanan nasional melalui system ketahanan nasional sangat diperlukan dalam menjalin hubungan dengan negara lain.

1.6.3 National Interest (Kepentingan Nasional)

Kepentingan nasional (*national interest*) menjadi landasan dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara yang mau dibentuk dan dilaksanakan sesuai kepentingannya serta menghasilkan perilaku suatu negara di dunia

internasional. Jadi perilaku negara akan kebijakan luar negerinya memiliki keterkaitan dengan kepentingan nasional suatu negara. Alasan utama dalam fenomena kepentingan nasional ini dijelaskan oleh *Jutta Weldes*, menurutnya kepentingan nasional sangat penting bagi politik internasional disebabkan oleh dua alasan penting yaitu pertama, melalui konsep kepentingan nasional para pembuat kebijakan memahami tujuan yang harus dikejar dan dicapai oleh kebijakan luar negeri suatu negara yang dalam prakteknya membentuk suatu dasar bagi tindakan dan perilaku negara. Kedua, berfungsi sebagai perangkat retorikal yang menghasilkan legitimasi dan dukungan politik bagi tindakan suatu negara yang telah dihasilkan. Kepentingan nasional ini memiliki kekuatan yang cukup besar dalam membantu mendirikan kepentingan dan untuk meligitimasi tindakan yang diambil oleh negara (Bence Nemeth, *“The Highly Important, Non-Existent National Interest”* Hal. 45).

Setiap negara mempunyai cara-cara yang berbeda untuk mewujudkan kemampuan minimal negaranya dan masing-masing memiliki prioritas yang berbeda-beda dalam beberapa hal fisik, politik dan kulturalnya, sehingga salah satu kepentingannya akan menonjol dari yang lain. Baik dalam segi pertahanan maupun ekonomi. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa kepentingan nasional dari seluruh sistem nilai yang digeneralisasikan pada keseluruhan kondisi yang dihadapi oleh suatu negara terhadap negara lain. Kepentingan nasional juga merupakan faktor penting bagi setiap negara dalam melaksanakan politik luar negeri, dimana ia tidak hanya menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan bagi pertimbangan strategis untuk menghadapi adanya ancaman tetapi juga akan menentukan pilihan skala prioritas politik luar negeri suatu negara (Nasution Dahlan, *“Konsep Politik Internasional”* Hal 32, 1983)

1.7 Alur Pemikiran



1.8 Asumsi

Dengan hubungan kerjasama pertahanan Jepang dengan Australia dalam menjaga kawasan di Asia Pasifik dapat memberikan manfaat yang baik bagi kawasan tersebut yaitu:

1. Setiap negara dalam konteks hubungan internasional akan melakukan adaptasi dalam kebijakan pertahanannya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya
2. Menghindari ancaman di kawasan Asia Pasifik di masa yang akan datang
3. Menjadikan kawasan Asia Pasifik menjadi lebih maju dan berkembang

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel yang ada, lalu di analisis untuk memperoleh jawaban pokok masalah yang ada.

1.9.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang didapat dari literature, artikel, jurnal dan sumber data penunjang lain yang merupakan hasil riset terdahulu seperti buku, jurnal maupun artikel ilmiah. Serta data primer yang bersumber dari Buku Putih Jepang maupun Australia.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak melakukan documentary research dan internet research yang kemudian diidentifikasi ide serta gagasan yang ada dalam berbagai literature laporan penelitian dan dokumen untuk kemudian digunakan dalam merangkai argumen untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.9.4 Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data ini penulis menggunakan teori sebagai acuan dalam menginterpretasikan data-data yang ada. Data-data dan fakta yang dikumpulkan akan disaring dan disesuaikan dengan indicator-indikator yang diturunkan dari konsep-konsep yang ada dalam teori yang digunakan. Selanjutnya data-data tersebut diagresikan dan digeneralisasikan untuk memperoleh penjelasan umum terhadap permasalahan yang akan diteliti.

1.10 Sistematika Penulisan

Dibawah ini merupakan sistematika penulisan yang akan penulis gunakan dalam menganalisa permasalahan yang ada pada penelitian:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, operasionalisasi konsep, asumsi, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: HUBUNGAN KERJASAMA JEPANG AUSTRALIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK

Bab kedua akan membahas tentang pertahanan Jepang yang juga membahas bagaimana Jepang melakukan kerjasama pertahanan dengan Australia.

BAB III: IMPLEMENTASI KERJASAMA JEPANG-AUSTRALIA (JADSC) DALAM MENJAGA KAWASAN ASIA PASIFIK 2012-2014

Bab ketiga akan membahas mengenai bagaimana implementasi kerjasama Jepang dengan Australia serta apa saja yang dilakukan untuk menjaga kawasan Asia Pasifik.

BAB IV: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang akan menjawab pertanyaan penelitian dan saran guna masukan terkait permasalahan tersebut.

